MUSYTARI

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi

Vol 25 No 8 Tahun 2026

ISSN : 3025-9495

PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING, CONTROLLING PADA STAF KPU KOTA SEMARANG

Umi Khoniatus Syarifah
Program Studi Manajemen, STIE Pelita Nusantara
Email: umikoniatus29@gmail.com

Abstract

The implementation of effective and transparent general elections and local elections requires structured administrative governance. This study aims to analyze the application of management functions Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC) among the staff of the General Elections Commission (KPU) of Semarang City. A qualitative descriptive research method was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the staff and commissioners of KPU Semarang City. The results indicate that the application of management functions within KPU Semarang City generally runs well. In the planning phase, work programs are compiled in a structured manner in accordance with national regulations. In the organizing phase, work division and organizational structures are clearly defined according to respective divisions. The actuating function is implemented through periodic coordination, leadership direction, and work motivation, while controlling is carried out through routine performance evaluations and multi-tiered supervision to minimize operational errors. Identified obstacles include an extremely high workload during critical election phases and dynamic changes in central regulations. This study concludes that the continuous reinforcement of actuating and controlling functions is crucial to maintaining the accountability and operational efficiency of the KPU Semarang City staff.

Keywords: Management Functions, POAC, KPU Semarang City, KPU Staff, Work Effectiveness.

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang efektif dan transparan memerlukan tata kelola tata usaha yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan) pada staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui, observasi, terhadap staf serta

Article history

Received: Agustus 2026

Reviewed: Agustus 2026

Published: Agustus 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ISSN : 3025-9495

komisioner KPU Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen di lingkungan KPU Kota Semarang secara umum telah berjalan dengan baik. Pada tahap *planning*, penyusunan tahapan program kerja dilaksanakan terstruktur sesuai regulasi nasional. Pada tahap *organizing,* pembagian kerja dan struktur organisasi terdefinisi dengan jelas sesuai dengan bidang masing-masing. Fungsi *actuating* diimplementasikan melalui koordinasi berkala, arahan kepemimpinan, dan motivasi kerja, sedangkan *controlling* dilakukan melalui evaluasi kinerja dan pengawasan bertingkat untuk meminimalisasi kesalahan operasional. Hambatan yang ditemukan meliputi beban kerja yang sangat tinggi pada masa krusial tahapan pemilu serta dinamisnya perubahan aturan dari pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan fungsi *actuating* dan *controlling* yang berkelanjutan sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensi kerja staf KPU Kota Semarang.

Kata Kunci: Fungsi Manajemen, POAC, KPU Kota Semarang, Staf KPU, Efektivitas Kerja.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya diukur dari terlaksananya seluruh tahapan sesuai jadwal, tetapi juga dari terwujudnya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pemilu dituntut memiliki tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan efektif agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam menjalankan tugasnya, KPU tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga mengelola berbagai tahapan yang meliputi penyusunan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi kepada masyarakat, pengelolaan logistik, pengelolaan sumber daya manusia, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kompleksitas tugas tersebut menuntut adanya sistem manajemen organisasi yang mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya secara efektif.

ISSN : 3025-9495

Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, KPU Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan sesuai kebijakan KPU Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas tersebut melibatkan koordinasi antara sekretariat, komisioner, badan adhoc, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, setiap tahapan memiliki target waktu yang telah ditetapkan sehingga seluruh aktivitas organisasi harus dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola proses manajemen secara menyeluruh. Salah satu cerminan keberhasilan organisasi penyelenggara pemilu adalah bagaimana melakukan mitigasi untuk melakukan pemetaan wilayah dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilu mendatang(Gultom & Dirgantara, 2022).

Pemilihan KPU Kota Semarang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kota Semarang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk dan jumlah pemilih yang besar sehingga penyelenggaraan pemilu memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 391 Tahun 2023, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 di Kota Semarang mencapai 1.239.669 pemilih yang tersebar di 16 kecamatan, 177 kelurahan, dan 4.646 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua, KPU Kota Semarang harus mengoordinasikan berbagai unsur penyelenggara pemilu, mulai dari sekretariat, komisioner, PPK, PPS, KPPS, hingga berkoordinasi dengan Bawaslu, Pemerintah Kota Semarang, Disdukcapil, dan aparat keamanan. Kondisi tersebut menjadikan KPU Kota Semarang sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji penerapan fungsi manajemen *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling* (POAC) dalam organisasi publik yang memiliki beban kerja tinggi, sistem koordinasi yang kompleks, serta tuntutan akuntabilitas yang besar. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh keterlibatan langsung peneliti melalui kegiatan magang sehingga memungkinkan proses observasi dilakukan secara lebih mendalam terhadap implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam aktivitas kerja sehari-hari.Salah satu konsep manajemen yang masih banyak digunakan dalam organisasi modern (George R.Terry).

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Nurindriani & Prakoso, (2021), fungsi POAC merupakan proses manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui fungsi planning**,** organisasi menetapkan sasaran, program kerja, dan kebutuhan sumber daya. Fungsi organizing mengatur pembagian tugas,

ISSN : 3025-9495

wewenang, dan koordinasi kerja. Fungsi actuating berperan menggerakkan seluruh anggota organisasi agar mampu melaksanakan pekerjaan sesuai rencana, sedangkan fungsi controlling dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga penyimpangan dapat segera diperbaiki(Ayu et al., 2025).

Fungsi *planning* (perencanaan) menjadi tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan target kerja, jadwal kegiatan, kebutuhan anggaran, pembagian sumber daya manusia, hingga identifikasi risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program. Menurut (Nurindriani & Prakoso, 2021), perencanaan yang baik akan mempermudah organisasi dalam menentukan arah kerja serta meminimalkan terjadinya penyimpangan selama pelaksanaan kegiatan.

Setelah perancanaan disusun, organisasi harus melaksanakan fungsi *organizing* (pengorganisasian). Pada KPU Kota Semarng, pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur kerja yang jelas, menetapkan tugas pokok dan fungsi setiap divisi, serta membangun koordinasi antar pegawai agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan sesuai rencana. Firdaus Jeka et al., (2024) menjelaskan bahwa pengorgasnisasian bertujuan untuk menciptakan pembagian kerja yang efektif sehingga setiap anggota organisasi memahami tanggung jawabnya masing-masing.

Fungsi *actuating* (pelaksanaan) yang berfokus pada upaya menggerakkan seluruh anggota organisasi agar bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan(Prabowo et al., 2023). Dalam lingkungan kerja KPU, pelaksanaan dilakukan melalui pemberian arahan pimpinan, koordinasi antar bagian, komunikasi kerja, motivasi pegawai, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul selama tahapann pemilu berlangsung. Menurut Asni, (2025), keberhasilan pelaksanaan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam memberikan motivasi, komunikasi, dan koordinasi kepada seluruh anggota organisasi.

Fungsi *controlling* (pengendalian) sebagai bentuk pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Penegendalian dilakukan melalui monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan apabila ditemukan penyimpangan dari rencana kerja. Dalam penyelenggaraan pemilu, fungsi pengendalian menjadi sangat penting karena berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Firdaus Jeka et al., (2024) menyatakan bahwa pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Penelitian mengenai penerapan fungsi manajemen POAC pada KPU menjadi penting mengingat keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan

ISSN : 3025-9495

regulasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, perencanaan program, koordinasi antar bagian, pelaksanaan kegiatan, serta sistem pengawasan yang efektif. Kompleksitas tahapan pemilu yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari penyusunan daftar pemilih, pengelolaan logistik, pembentukan badan adhoc, sosialisasi kepada masyarakat, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara, memerlukan penerapan fungsi manajemen yang terintegrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi KPU dalam meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, sekaligus memperkaya kajian akademik mengenai penerapan teori POAC pada organisasi sektor publik, khususnya lembaga penyelenggara pemilu.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penerapan fungsi POAC, penelitian (Sihombing, 2025) Menunjukkan bahwa fungsi POAC memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa organisasi yang mampu menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian secara sinergis akan memiliki tingkat efektivitas kerja yang lebih baik dibandingkan organisasi yang belum menerapkannya secara optimal. Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi fungsi POAC pada organisasi, penelitian yang mengkaji penerapan fungsi POAC pada lemmbaga penyelenggara pemilu masih relatife terbatas. Padahal karakteristik organisasi publik seperti KPU memiliki sistem kerja yang sangat kompleks karena harus menjalankan tugas berdasarkan regulasi, jadwal nasional, serta prinsip independensi dalam penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai penerapan fungsi manajemen *planning, organizing, actuating, controlling,* pada staf KPU Kota Semarang menjadi penting untuk mengetahui bagaimana keempat fungsi tersebut diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Meskipun penelitian mengenai penerapan fungsi manajemen *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling* (POAC) telah banyak dilakukan pada organisasi sektor pendidikan, perusahaan, maupun lembaga pelayanan publik, kajian yang secara khusus membahas implementasi fungsi POAC pada lembaga penyelenggara pemilu masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengaruh POAC terhadap efektivitas organisasi secara umum, sedangkan penelitian yang mengkaji bagaimana fungsi-fungsi manajemen tersebut diterapkan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu, khususnya pada tingkat kabupaten/kota, masih belum banyak ditemukan(Gultom et al., 2026). Padahal, KPU sebagai lembaga publik memiliki karakteristik organisasi yang berbeda karena bekerja berdasarkan tahapan pemilu yang bersifat nasional, terikat pada regulasi yang

ISSN : 3025-9495

dinamis, memiliki batas waktu pelaksanaan yang ketat, serta dituntut menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan (research gap) tersebut dengan memberikan gambaran empiris mengenai implementasi fungsi POAC pada organisasi penyelenggara pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi manajemen *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling* (POAC) pada staf KPU Kota Semarang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi setiap fungsi manajemen dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, meningkatkan koordinasi organisasi, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan tata kelola manajemen di lingkungan KPU Kota Semarang.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan fungsi *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* pada staf KPU Kota Semarang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena yang terjadi secara alamiah berdasarkan pengalaman, persepsi, dan aktivitas para informan dalam menjalankan tugas organisasi. Menurut (*Sugiyono, 2022*.), penerapan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk kondisi objek yang bersifat alamiah, dimana penelitian berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Subjek penelitian adalah pegawai/staf KPU Kota Semarang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Informan penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti jabatan, pengalaman kerja, serta keterlibatan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan kegiatan organisasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri atas 1 sekretaris KPU, 1 kepala subbagian, dan 4 staf dari divisi yang berbeda sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai penerapan fungsi manajemen di lingkungan KPU Kota Semarang. Menurut (*Sugiyono, 2022*) , *purposive sampling* digunakan dalam penelitian kualitatif karena informan dipilih berdasarkan kamampuan memberikan informasi yang paling relevan erhadap fokus penelitian.

Objek penelitian adalah penerapan empat fungsi manajemen, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* (POAC) pada pelaksanaan tugas staf KPU Kota Semarang.

ISSN : 3025-9495

Aspek *planning* dikaji melalui proses penyusunan program kerja, perencanaan kegiatan, dan penentuan target organisasi. Aspek *organizing* difokuskan pada pembagian tugas, struktur orgaanisasi, serta koordinasi antar bagian. Aspek *actuating* meliputi pelaksanaan pekerjaan, komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan. Sementara aspek *controlling* mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas kerja pegawai serta penerapan fungsi manajemen dilingkungan KPU Kota Semarang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument)* yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data penelitian. Menurut (*Sugiyono, 2022*), dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument utama karena memiliki kemampuan menyesuaikan proses pengumpulan data dengan kondisi yang terjadi dilapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan fungsi *Planning* pada staf KPU Kota Semarang

Langkah awal dalam menerapkan POAC pada perusahaan adalah membuat *Planning* (perencanaan). Menurut Muhamad Faiz et al., (2024) Fungsi manajemen *planning* (perencanaan) pada staf KPU Kota Semarang telah diterapkan secara sistematis sebagai langkah awal dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum. Perencanaan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), serta pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Seluruh program kerja disusun sebelum tahapan pemilu dimulai agar setiap kegiatan memiliki tujuan, jadwal, anggaran, dan indikator keberhasilan yang jelas.

Setiap divisi menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Divisi Teknis Penyelenggaraan merencanakan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara, divisi Perencanaan dan Logistik menyusun kebutuhan logistik pemilu, divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM merancang kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan sekretariat menyusun kebutuhan administrasi, keuangan, dan dukungan operasional. Pembagian perencanaan berdasarkan bidang kerja tersebut membuat setiap staf memahami tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang di KPU Kota Semarang, setiap awal tahapan pemilu dilaksanakan rapat koordinasi sebagai dasar penyusunan rencana kerja masing-masing divisi. Dalam kegiatan tersebut setiap divisi menyampaikan

ISSN : 3025-9495

kebutuhan program, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta target penyelesaian pekerjaan yang selanjutnya disesuaikan dengan tahapan Pemilu yang telah ditetapkan KPU RI. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa seluruh staf KPU Kota Semarang bekerja sesuai arahan yang disusun oleh sekertaris KPU Kota semarang mendasari petrunjuk teknis yang telah di tetapkan oleh KPU RI bekerja berdasarkan jadwal kegiatan yang telah disusun sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih terarah.

Selanjutnya, penerapan fungsi *planning* pada KPU Kota Semarang menunjukkan bahwa perencanaan telah menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Penyusunan program kerja dilakukan secara sistematis melalui penetapan tujuan, jadwal kegiatan, kebutuhan anggaran, pembagian sumber daya manusia, serta identifikasi potensi kendala yang mungkin muncul selama proses penyelenggaraan pemilu. Perencanaan yang disusun secara terstruktur memberikan pedoman yang jelas bagi setiap divisi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, penerapan fungsi *planning* pada staf KPU Kota Semarang telah berjalan dengan baik karena seluruh kegiatan diawali dengan penyusunan rencana kerja yang jelas, pembagian tanggung jawab yang sesuai, serta koordinasi antar bagian yang cukup efektif. Perencanaan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi manajemen berikutnya, yaitu *organizing*, *actuating*, dan *controlling*, sehingga seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kemampuan organisasi dalam menyesuaikan perencanaan terhadap perubahan regulasi dan dinamika penyelenggaraan pemilu masih perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia pada tahapan tertentu mengharuskan KPU Kota Semarang melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah disusun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan dalam organisasi publik harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kebijakan tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun ketepatan pelaksanaan tahapan pemilu.

3.2 Penerapan fungsi *Organizing* pada staf KPU Kota Semarang

Fungsi manajemen *organizing (*pengorganisasian) pada staf KPU Kota Semarang telah diterapkan melalui pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing bagian.

ISSN : 3025-9495

Pengorganisasian dilakukan agar seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendukung setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa KPU Kota Semarang memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Ketua KPU, anggota KPU yang membawahi beberapa divisi, Sekretaris, kepala subbagian, serta staf pelaksana. Masing-masing bagian memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan bidang kerjanya. Misalnya, Divisi Teknis Penyelenggaraan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis mengenai penyelenggaraan pemilu. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi menangani penyusunan perencanaan program kerja dan pengelolaan data pemilih. Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.Selanjutnya devisi hukum dan pengawasan memastikan seluruh pelaksanaan tahapan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Ketua KPU sendiri membawahi divisi keuangan umum, rumah tangga, dan logistic yang bersama-sama dengan sekertaris memberikan dukungan pengadministrasian, keuangan, dan juga manajmen logistic,(Henry Casandra, 2021). Pembagian tugas tersebut membuat setiap staf memahami pekerjaan yang harus dilaksanakan sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian di KPU Kota Semarang telah berjalan dengan baik karena setiap staf bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala,atau risiko terutama pada masa tahapan pemilu yang memiliki jadwal sangat padat (Basyirah & Wardi, 2020). Pada kondisi tersebut, beberapa divisi mengalami peningkatan beban kerja sehingga membutuhkan dukungan dari divisi lain. Oleh karena itu, pimpinan melakukan penyesuaian pembagian tugas serta memperkuat koordinasi lintas divisi agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, selama tahapan pemilu yang memiliki beban kerja tinggi ditemukan adanya peningkatan volume pekerjaan pada beberapa divisi tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengorganisasian tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi juga pada kemampuan pimpinan dalam melakukan redistribusi pekerjaan, membangun kolaborasi lintas divisi, serta memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal agar seluruh target pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

3.3 Penerapan fungsi Actuating pada staf KPU Kota Semarang

Fungsi manajemen *actuating* (pelaksanaan atau pengarahan) pada staf KPU Kota Semarang telah diterapkan melalui pemberian arahan, koordinasi, komunikasi, motivasi,

ISSN : 3025-9495

serta pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan kepada seluruh staf dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Fungsi actuating berperan penting dalam menggerakkan seluruh sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah disusun serta tujuan organisasi yang ingin dicapai,menurut (Hidayat, 2024).

Hasil observasi menunjukkan bahwa komunikasi antara pimpinan dan staf berlangsung secara terbuka. Staf diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala, memberikan saran, maupun meminta penjelasan apabila terdapat perubahan kebijakan atau petunjuk teknis dari KPU Republik Indonesia. Selain melalui rapat formal, komunikasi juga dilakukan secara cepat melalui media komunikasi internal sehingga informasi mengenai perubahan jadwal, regulasi, atau kegiatan dapat segera diterima oleh seluruh staf. Pola komunikasi tersebut membantu mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi antarbagian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi *actuating* di KPU Kota Semarang mampu menciptakan kerjasama yang baik antar staf. Setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, namun tetap saling membantu apabila terdapat divisi yang mengalami peningkatan beban kerja pada tahapan tertentu. Kerjasama tersebut terlihat pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik pemilu, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, hingga proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi dan pengarahan yang diberikan pimpinan mampu meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Temuan tersebut sejalan dengan teori George R. Terry yang menjelaskan bahwa fungsi *actuating* merupakan proses menggerakkan seluruh anggota organisasi agar bersedia bekerja secara sukarela dan optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Asni, 2025) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif, motivasi kerja, dan kepemimpinan yang baik merupakan faktor utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.

3.4 Penerapan fungsi *Controlling* pada staf KPU Kota Semarang

Fungsi manajemen *controlling* (pengawasan*)* pada staf KPU Kota Semarang telah diterapkan sebagai upaya untuk memastikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta target yang telah ditetapkan . Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pekerjaan. Tujuan utama fungsi controlling adalah mengetahui tingkat pencapaian kinerja, mengidentifikasi

ISSN : 3025-9495

hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan, serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi controlling telah membantu KPU Kota Semarang dalam mendeteksi berbagai kendala sejak dini. Sebagai contoh, apabila ditemukan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada salah satu divisi, pimpinan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui penyebabnya dan mengambil langkah perbaikan, seperti penyesuaian jadwal kerja, redistribusi tugas kepada staf lain, atau pemberian pendampingan teknis. Tindakan tersebut mampu mengurangi risiko keterlambatan pelaksanaan tahapan pemilu dan menjaga agar seluruh kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No.115, Sarirejo, Kec. Semarang Penelitian dilakukan selama kegiatan magang pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2026.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan fungsi manajemen *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) pada staf KPU Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa keempat fungsi manajemen telah diterapkan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemilu. Penerapan fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif, profesional, transparan, dan akuntabel.

Pada fungsi *planning* (perencanaan), KPU Kota Semarang telah menyusun program kerja berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu, peraturan perundang-undangan, serta pedoman yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Perencanaan dilakukan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh divisi sehingga tujuan, jadwal kegiatan, kebutuhan anggaran, dan pembagian tugas dapat direncanakan secara sistematis. Meskipun demikian, perubahan regulasi selama tahapan pemilu mengharuskan organisasi melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah disusun.

Pada fungsi *organizing* (pengorganisasian), pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab telah dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan tugas pokok masing-masing divisi. Koordinasi antarbagian berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi maupun komunikasi internal sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih terarah. Selain itu, pembentukan tim kerja pada setiap tahapan pemilu membantu meningkatkan efektivitas penyelesaian tugas. Namun, pada masa tahapan yang padat masih ditemukan

ISSN : 3025-9495

ketidakseimbangan beban kerja pada beberapa divisi sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama lintas bagian.

Pada fungsi *actuating* (pelaksanaan atau pengarahan), pimpinan telah berperan aktif dalam memberikan arahan, motivasi, pembinaan, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh staf. Pengarahan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan melalui briefing dan rapat koordinasi, sedangkan pembinaan diberikan melalui bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas. Komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan staf mampu meningkatkan kerja sama, mempercepat penyelesaian masalah, dan mendukung kelancaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya, pada fungsi *controlling* (pengawasan**)**, KPU Kota Semarang telah melaksanakan monitoring, evaluasi, pemeriksaan administrasi, serta pelaporan kinerja secara berkala. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, dan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan terhadap kendala yang ditemukan sehingga kualitas pelaksanaan tugas dapat terus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen POAC pada staf KPU Kota Semarang telah mendukung efektivitas pelaksanaan tugas organisasi. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti perubahan regulasi, peningkatan beban kerja pada tahapan tertentu, dan perlunya peningkatan koordinasi lintas divisi, secara umum sistem manajemen yang diterapkan telah mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, profesional, dan berintegritas.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada KPU Kota Semarang**,** sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh KPU di Indonesia yang memiliki karakteristik organisasi dan kondisi penyelenggaraan pemilu yang berbeda. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga temuan penelitian sangat bergantung pada hasil observasi, dan studi dokumentasi serta interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh. Ketiga, informan penelitian masih terbatas pada staf di lingkungan KPU Kota Semarang sehingga belum mencakup seluruh pemangku kepentingan, seperti PPK, PPS, maupun KPPS. Meskipun demikian, keabsahan data telah diupayakan melalui teknik triangulasi sumber dan metode sehingga hasil penelitian tetap dapat memberikan gambaran

mengenai penerapan fungsi manajemen *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling* (POAC) pada staf KPU Kota Semarang serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki cakupan wilayah dan informan yang lebih luas. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif, keterbatasan ruang lingkup, jumlah informan, serta subjektivitas analisis merupakan hal yang wajar, sehingga diperlukan triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian.

Ucapan terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada KPU Kota Semarang atas kesempatan yang diberikan selama kegiatan magang berlangsung manjadi inspirasi bagi saya pribadi, ucapan terimkasih saya sampaikan kepada mentor , dan semua pihak yang telah memberikan masukan, arahan, dan dukungan selama proses penyusunan artikel sampai selesai.

5. DAFTAR PUSTAKA

Asni, A., Dasalinda, D., & Chairunnisa, D. (2024). Penerapan fungsi manajemen poac (planning, organizing, actuating, and controlling) dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, *9*(1), 357-364.

Ayu, S. S., Setiawati, I., & Gultom, H. C. (2025). Product Quality and Brand Image on the Purchase Decision of Sari Roti Clear Bread with Customer Satisfaction as a Moderating Variable. INTERNATIONAL CONFERENCE OF ECONOMICS AND BUSINESS,

Asni, A., & Chairunnisa, D. (2025). *The role of POAC management functions in enhancing the quality of counseling guidance services for students in schools in Indonesia*. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 13(1), 89–101. https://doi.org/10.29210/1138100

Basyirah, L., & Wardi, M. C. (2020). Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, *17*(1), 61–74. https://doi.org/10.19105/nuansa.v17i1.2836

(Firdaus Jeka,A.dkk 2024)Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 189–197.

Gultom, H. C., & Dirgantara, I. M. B. (2022). The Phenomenon of Increasing Political Participation in the 2020 Major Election of Semarang with One Candidate Pair in Political Marketing Perspective. *Budapest International Research Critics Institute : Humanities Social Sciences*, *5*(2), 8478-8492.

ISSN : 3025-9495

Gultom, H. C., Muharam, H., & Dirgantara, I. M. B. (2026). The Mediating Role Of Political Innovation Capability In the Influence Of Proactive Market Orientation On Voter Participation In Indonesia. *Veredas do Direito*, *23*(7), e6490-e6490.

Henry Casandra, G. (2021). ADA APA DENGAN PLWKT SMG 2020. In: KPU Kota Semarang.

Hidayat, R. (2024). Analisis Perbandingan Penerapan Fungsi POAC dalam Perusahaan Eastman Kodak Company dan Fujifilm Holdings Corporation. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 135–144. https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.5224

Muhamad Faiz, Rafli Suciamy, Siti Zaskia, & Hesti Kusumaningrum. (2024). Implementasi POAC dalam Manajemen Pendidikan Modern. *Reflection : Islamic Education Journal*, *1*(4), 26–36. https://doi.org/10.61132/reflection.v1i4.157

Nurindriani, A., & Prakoso, A. A. (2021). Penerapan Pola Managemen Planning Organizing Actuating Controlling di KB Bina Prestasi Penusupan Tegal. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, *3*(2), 164. https://doi.org/10.35473/ijec.v3i2.987

Prabowo, H., Kurniawan, B., Sutrisno, S., & Gultom, H. C. (2023). Peningkatan Pemahaman Tentang Promosi Dan Pemanfaatan Aplikasi Editing Di Smartphone Untuk Konten Promosi Digital. *jurnal ABDIMAS Indonesia*, *1*(3), 150-154.

Sugiyono, D. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Sihombing, C. O. (2025). Analisis Pengaruh Fungsi Manajmen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam peningkatan kinerja di PT SOCFINDO ACEH BARAT. *Jurnal Inovasi Manajemen dan Kewirausahaan*, *6*(3)

Sadhuputri, A. (2026). Penerapan POAC Kunci Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Usaha BUM Desa Komoditas Padi dan Beras. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, *6*(02), 18–37. https://doi.org/10.47701/bismak.v6i02.6025